

# **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DPRD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **JURNAL**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:  
J O F R I  
NIM. 106010103111023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013**

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DPRD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jofri<sup>1</sup>; Masruchin Ruba'i<sup>2</sup>; Jazim Hamidi<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Tindak pidana pemilihan umum adalah perbuatan melanggar hukum, yang telah diatur secara rinci mulai dari pasal 260 sampai dengan pasal 311 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diundangkan pada tanggal 31 maret 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 51) dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat, serta ancaman pidananya bersifat kumulatif yakni penjatuhan 2 (dua) pidana pokok dalam satu perkara, yaitu pidana penjara dan juga pidana denda.

**Kata kunci :** penyelesaian, tindak pidana, pemilihan umum

### ABSTRACT

*Doing an injustice general election [is] deed impinge law, which have been arranged in detail start from section 260 up to section 311 [Code/Law] Republic Of Indonesia Number 10 year 2008 about General election Parliament member, Council Delegation [of] Area, and Parliament Area, invited on 31 maret 2008 ( Republic Of Indonesia year statute book 2008 number 51) and its inspection [is] [done/conducted] with brief inspection event, and also its crime threat have the character of cumulative namely fallout 2 ( fundamental crime) in one case, that is crime serve a sentence as well as [penalty/fine] crime.*

**Keyword :** settelment, criminal, election

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Guru Besar Bidang Hukum Pidana di Universitas Brawijaya

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua, Doktor Bidang Hukum Tata Negara di Universitas Brawijaya

## **LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak adanya Pemilihan Umum yang Pertama tahun 1955 sebenarnya sudah menerapkan sistem Demokrasi, akan tetapi pada saat itu hanya berlaku untuk memilih Wakil-wakil rakyat yang akan menjadi anggota Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), akan tetapi seiring dengan adanya perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin baik, maka bukan hanya lembaga legislatif saja yang di pilih secara langsung oleh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih melalui Pemilihan Umum, akan tetapi juga Lembaga Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden yang semula menjadi kewenangan/dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Gubernur dan Wakil Gubernur yang semula merupakan kewenangan/dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang semula merupakan kewenangan/dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) pun harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih.

Hal ini didasari oleh berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan yang terakhir yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; demikian pula Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan yang terakhir yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Yang kemudian mengalami perubahan yang terakhir yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden; serta Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Perundang-undangan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang Pemilihan Umum selalu mengalami perubahan-perubahan setiap periode yang kadang-kadang membingungkan masyarakat, hal tersebut menjadi perhatian serius bagi Para Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu, dan Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah adanya beberapa ketentuan Undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena melanggar ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap kali diadakannya Pemilihan Umum di Indonesia, selalu saja terjadi Tindak Pidana Pemilu walaupun Peraturan Perundang-undangan dengan tegas melarang adanya perbuatan yang di golongkan kedalam perbuatan Tindak Pidana Pemilu.

Di Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu tahun 2009, banyak tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwaslu akan tetapi sedikit saja yang dapat dilanjutkan prosesnya sampai ke Pengadilan.

Contoh kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu salah satunya terjadi di kota Bontang pada saat Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, telah terjadi suatu tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu Zulham, S. Sos Bin Paijan (seorang anggota DPRD Bontang) bersama istrinya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 290 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (melakukan Pencontrengan dua kali pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda), setelah diproses dan di adili di Pengadilan Negeri Bontang ternyata kedua Terdakwa tersebut (Suami-Istri) hanya di beri putusan Pidana penjara percobaan; dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji/ diteliti lebih mendalam guna menemukan jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang membedakan penyelesaian tindak pidana pemilihan umum dengan penyelesaian tindak pidana Umum/lainnya?
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam Penyelesaian suatu tindak pidana pemilihan umum DPRD di Provinsi Kalimantan Timur?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi hambatan-hambatan penyelesaian suatu tindak pidana pemilihan umum?

---

<sup>4</sup> Putusan No. 08/Pid. S/2009/PN. Btg, tanggal 08 Mei 2009

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum secara *Empiris*. "Penelitian hukum secara *empiris* adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian Ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum<sup>5</sup>".

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum adalah merupakan perwujudan dari suatu istilah yang sering disebut *Demokrasi*. Istilah "*Demokrasi* yang menurut asal kata berarti Rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *Demos* berarti Rakyat, *kratos/ kratein* berarti kekuasaan/ berkuasa)"<sup>6</sup>.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution; *Metode Penelitian Ilmu Hukum*; Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.123.

<sup>6</sup> Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.105).

<sup>7</sup> Moh.Mahfud MD, edisi revisi *Politik Hukum di Indonesia*, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.60-61.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak menggunakan istilah Tindak pidana pemilu tapi menggunakan istilah Pelanggaran pidana pemilu yang diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang di atur dalam Undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum<sup>8</sup>.

Bahwa adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan umum tersebut, telah diatur secara rinci mulai dari pasal 260 sampai dengan pasal 311 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diundangkan pada tanggal 31 maret 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 51) dan sekaligus mencabut Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara tahun 2003 nomor 37, tambahan lembaran Negara nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2006 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 4631); dan

ancaman pidananya bersifat kumulatif yakni penjatuhan 2 (dua) pidana pokok dalam satu perkara, yaitu selain hukumannya (sanksi) pidana penjara juga di kenakan pidana denda.

Djoko Prakoso, S.H., memberi pengertian tentang Tindak pidana pemilu sebagai berikut<sup>9</sup>: Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang di selenggarakan menurut Undang-undang.

Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan<sup>10</sup> :

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Selanjutnya dinyatakan : Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu di mulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh

<sup>8</sup> Pasal 252 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008.

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, SH, *Tindak pidana pemilu*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hal.148

<sup>10</sup> Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

tahapan penyelenggaraan pemilu selesai<sup>11</sup>.

Proses penyelesaian tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu<sup>12</sup>. Laporan pelanggaran Pemilu tersebut di atas dapat di sampaikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b. Pemantau Pemilu;
  - c. Peserta Pemilu<sup>13</sup>.

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak Terlapor;
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
- d. Uraian kejadian<sup>14</sup>.

Laporan pelanggaran Pemilu di sampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu<sup>15</sup>.

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji

setiap laporan pelanggaran yang diterima<sup>16</sup>.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima<sup>17</sup>.

Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima<sup>18</sup>.

Laporan Tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>19</sup>.

2. Setelah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan tindak Pidana Pemilu, lalu Tindak Pidana Pemilu tersebut digelar di dalam sebuah tim yang disebut Tim Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), kemudian setelah ada kesepakatan dari tim bahwa laporan tersebut merupakan Tindak Pidana pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan

---

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 71.

<sup>12</sup> UU RI No. 10 Tahun 2008, loc.cit, Pasal 247

ayat (1).

<sup>13</sup> Ibid, ayat (2)

<sup>14</sup> Ibid, ayat (3)

<sup>15</sup> Ibid, ayat (4)

---

<sup>16</sup> Ibid, ayat (5)

<sup>17</sup> Ibid, ayat (6)

<sup>18</sup> Ibid, ayat (7)

<sup>19</sup> Ibid, ayat (9)

berkas Tindak Pidana Pemilu tersebut kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah berkas diserahkan kepada penyidik, maka penyidik melakukan hal-hal sebagai berikut<sup>20</sup>:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.
  - (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk di lengkapi.
  - (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.
3. Setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara dan Tersangka kepada Penuntut Umum; Kemudian Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara<sup>21</sup>.
  4. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pidana Pemilu

menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang; Sidang pemeriksaan perkara Pidana Pemilu dilakukan oleh hakim khusus<sup>22</sup>. Selanjutnya Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara; Dalam hal terhadap putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan; Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima<sup>23</sup>.

5. Perkara banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi, kemudian Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah Permohonan banding diterima; Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain<sup>24</sup>. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi harus sudah di sampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan<sup>25</sup>.
6. Setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Putusan Pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan di terima oleh Jaksa<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 253 ayat (1), (2), (3).

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 253 ayat (4).

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 254 ayat (1), (2).

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 255 ayat (1), (2), (3).

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 255 ayat (4), (5).

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 256 ayat (1).

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 256 ayat (2).

Putusan Pengadilan terhadap kasus Tindak Pidana Pemilu yang menurut Undang-undang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional; KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan; Salinan putusan Pengadilan harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan Pengadilan tersebut dibacakan<sup>27</sup>.

Dari uraian tersebut di atas, ternyata ada beberapa perbedaan penyelesaian tindak pidana Pemilu dengan penyelesaian tindak pidana umum lainnya, antara lain:

1. Masalah lewat waktu (kadaluwarsa). Dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu, laporan tindak pidana harus disampaikan kepada Panwaslu paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbuatan dilakukan; apabila lewat, maka perkara tersebut gugur karena lewat waktu (Kadaluwarsa). Sedangkan dalam penyelesaian tindak pidana umum lainnya, kewenangan menuntut pidana hapus karena<sup>28</sup>:
  - a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
  - b. Mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  - c. Mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  - d. Mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

- e. Pada delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu Sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia<sup>29</sup>.

2. Aparat yang berwenang menerima laporan atau Pengaduan dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu:
  - a. laporan tindak pidana harus di sampaikan kepada Bawaslu/Panwaslu;
  - b. Tindak pidana pemilu tidak mengenal delik aduan atau klacht delict (dimana suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penyelidikan apabila ada pengaduan).

Sedangkan dalam penyelesaian tindak pidana umum lainnya, laporan tindak pidana harus di sampaikan kepada Polri. Selain tindak pidana biasa (kriminal), juga di kenal adanya delik aduan (klacht delict).

3. Pemeriksaan dan Penjatuhan pidana, dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu pemeriksaan dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat, dan Putusan hakim berupa putusan kumulatif (penjatuhan dua pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda). Putusan dibacakan dengan hadirnya Terdakwa (tidak boleh putusan in absensia). Sedangkan dalam penyelesaian tindak pidana umum lainnya pemeriksaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) acara, yaitu:

<sup>27</sup> Ibid, Pasal 257 ayat (1), (2), (3).

<sup>28</sup> Pasal 78 ayat (1) KUHP, DR. Andi Hamzah, SH, *KUHP & KUHP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

<sup>29</sup> Ibid, Pasal 74 ayat (1).



Acara pemeriksaan biasa; Acara pemeriksaan singkat; dan Acara pemeriksaan cepat. Putusan hakim berupa putusan alternatif (menentukan hanya satu pidana pokok); kecuali ada penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang di ajukan oleh korban (orang yang dirugikan) paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana<sup>30</sup>. Putusan dapat di-bacakan tanpa hadirnya Terdakwa.

4. Dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu, upaya hukum hanya sampai banding (Pengadilan Tinggi). Sedangkan dalam penyelesaian tindak pidana umum lainnya, upaya hukum dapat berupa :

- a. Upaya hukum biasa berupa Banding. Permintaan banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum; Permintaan banding diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan di jatuhkan atau setelah putusan di beritahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir<sup>31</sup>. Dapat juga berupa Kasasi, yaitu Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas<sup>32</sup>. Permohonan kasasi disampaikan oleh Pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa<sup>33</sup>.

- b. Upaya hukum luar biasa dengan Kasasi demi kepentingan hukum; terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat di ajukan satu kali permohonan Kasasi oleh Jaksa Agung<sup>34</sup>. Serta dengan Peninjauan kembali; Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung<sup>35</sup>. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar<sup>36</sup>:

- 1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 98 ayat (1), (2) KUHP.

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 233 ayat (1), (2).

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 244 ayat (1)

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 245 ayat (1)

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 259 ayat (1)

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 263 ayat (1)

<sup>36</sup> Ibid, ayat (2).

Hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian suatu tindak pidana pemilu di provinsi Kalimantan Timur pada umumnya, antara lain :

1. Hambatan yang di alami oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)<sup>37</sup>:

- a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat, yaitu paling lambat 3 hari sejak tindak pidana Pemilu dilakukan laporan harus sudah diterima oleh Panwaslu Kabupaten/Kota), hal ini menjadikan Panwaslu Kabupaten/Kota kesulitan untuk mencari alat-alat bukti.
- b. Masyarakat yang mengetahui tindak pidana Pemilu ada yang tidak bersedia menjadi saksi, sementara saksi sebagai alat bukti minimal 2 (dua) orang.
- c. Keterbatasan personil yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang setiap Kabupaten/Kota mengakibatkan sulitnya untuk menjangkau wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Sebelum tindak pidana Pemilu di limpahkan kepada Penyidik Kepolisian, terlebih dahulu tindak pidana Pemilu tersebut di ekspos (gelar perkara) di dalam tiem sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), sehingga anggota Panwaslu yang kurang berpengalaman menangani tindak pidana pemilu menjadi penghambat jalannya proses pemeriksaan selanjutnya.

2. Hambatan yang di alami oleh Penyidik Kepolisian<sup>38</sup>:

- a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari

Panwaslu Kabupaten/Kota harus menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum.

- b. Tindak pidana Pemilu yang ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun dan Tersangkanya tidak ditahan, sangat besar kemungkinan bagi Tersangka untuk melarikan diri atau menghilangkan alat bukti.

3. Hambatan yang di alami oleh Kejaksaan Negeri<sup>39</sup>:

- a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima bekas perkara dari Penyidik Kepolisian, harus sudah melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri, hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum bekerja keras dan memprioritaskan penyelesaiannya dari perkara lain.
- b. Demikian pula oleh karena Jaksa harus melaksanakan putusan Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa, maka Kejaksaan kesulitan melaksanakannya kalau Terpidana melarikan diri (karena dari semula Terdakwa tidak ditahan).
- c. Pada saat Putusan dibacakan dalam persidanganpun, Jaksa Penuntut Umum harus menghadirkan Tersangka (tidak diperkenankan putusan In Absensia atau putusan tanpa kehadiran Terdakwa).

4. Hambatan yang di alami oleh Pengadilan Negeri<sup>40</sup>:

---

<sup>37</sup> Jawaban tertulis mantan Ketua Panwaslu Kota Bontang tahun 2009 (Aliyasan, S.Ag) tertanggal 08 Juni 2012, atas questioner Penulis.

<sup>38</sup> Wawancara dengan mantan anggota tim Gakkumdu dari unsur Kepolisian Kota Samarinda tahun 2009 (AKP Fatich Nurhadi) di Samarinda, pada hari Senin, 25 Juni 2012.

---

<sup>39</sup> Jawaban tertulis kepala Kejaksaan Negeri Bontang (Budi Handaka, SH) tanggal 28 Juni 2012 atas questioner Penulis, dan jawaban lisan Kepala seksi pidana umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Samarinda (Tommy Adyaksa Putra, SH) di Samarinda hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012.

- a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum, membuat majelis Hakim segera mengadili perkara tersebut.
  - b. Putusan Pengadilan Negeri (tertulis) harus sudah di sampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
  - c. Walaupun perkara tindak pidana pemilu di periksa, di adili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, tapi kalau Jaksa Penuntut Umum mengajukan perkara tersebut dalam acara pemeriksaan biasa (karena itu merupakan kewenangan Jaksa), maka hakim harus menerimanya; kecuali Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan Terdakwa atau alat-alat bukti dalam persidangan pada hari sidang pertama yang ditentukan oleh majelis Hakim, maka majelis Hakim mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya di periksa dengan acara pemeriksaan biasa.
5. Hambatan yang di alami oleh Pengadilan Tinggi<sup>41</sup>:
- a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu Pengadilan Tinggi memeriksa, dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, membuat majelis Hakim harus segera mengadili dan memutuskan perkara tersebut.
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi harus sudah diketik dan ditandatangani oleh majelis Hakim Tinggi, oleh karena di sampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian suatu tindak pidana pemilu di Kota Bontang dan Kota Samarinda pada khususnya dan di Kalimantan Timur pada umumnya, Panwaslu, Penyidik Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi melakukan beberapa upaya, antara lain :
1. Upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)<sup>42</sup>.
    - a. Memperkuat pengawasan disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS);
    - b. Melakukan kerjasama dengan Pemantau, Saksi, Perguruan Tinggi, dan tiem Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu);
    - c. Melakukan pengawasan secara Preventif, yaitu dengan memberi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar segala Tindak Pidana Pemilu segera dilaporkan kepada Panwaslu;
    - d. Melakukan Pengawasan secara Represif, yaitu Penanganan dan tindaklanjut tindak pidana Pemilu segera di ekspos (digelar) dalam tiem sentra Gakkumdu dan selanjutnya

<sup>40</sup> Hasil wawancara (lisan) Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (Sugeng Hiyanto, SH, MH) di Samarinda dengan Penulis pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012.

<sup>41</sup> Wawancara (lisan) Penulis dengan Hakim/humas Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Makmun Masduki, SH, MM) di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012.

<sup>42</sup> Bahan ceramah anggota Bawaslu (Wirdyaningsih, SH, MH) pada Temu Wicara antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia, Jakarta, 14 Pebruari 2009, hal.11.

meneruskan kepada Penyidik Polri.

2. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian<sup>43</sup>:

- a. Sentra Gakkumdu harus berjalan dan di berdayakan sebagai wadah koordinasi dan kerjasama semua unsur (Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Panwaslu);
- b. Penanganan perkara jangan sampai lewat waktu;
- c. Penanganan tindak pidana Pemilu menggunakan acara pemeriksaan singkat;
- d. Untuk mengantisipasi ketidakhadiran saksi di persidangan, semua saksi diambil sumpahnya;
- e. Tindakan Kepolisian terhadap anggota *Legislatif* dan Pejabat Negara tertentu yang memerlukan ijin khusus, tidak perlu ijin dalam tindak pidana Pemilu;
- f. Tindak pidana Pemilu yang ditemukan oleh anggota Polri, diserahkan kepada Panwaslu atau pihak-pihak lain yang mempunyai wewenang melaporkan tindak pidana Pemilu;
- g. Tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) diserahkan oleh Panwaslu kepada POM TNI.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri<sup>44</sup>:

- a. Sejak awal penanganan kasus di tingkat Penyidikan Kepolisian, pihak Kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan (masuk dalam sentra Gakkumdu), sehingga

duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Panwaslu melimpahkan perkara tindak pidana Pemilu ke Penyidik Polri;

- b. Dengan adanya sentra Gakkumdu, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan/matrik yang memuat unsur-unsur tindak pidana Pemilu dan fakta-fakta perbuatan, dan pada saat Tersangka dan barang bukti dikirim/diterima dari Penyidik Kepolisian, maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga;
- c. Jaksa Penuntut Umum harus mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu : Saksi-saksi, Tersangka, dan Majelis Hakim.

4. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri<sup>45</sup>:

- a. Putusan harus segera diketik, karena 3 (tiga) hari sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, harus sudah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- b. Dari 52 (lima puluh dua) Pasal tindak pidana, terdapat 6 (enam) pasal yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun yaitu Pasal 266, 291, 297, 298, 300, dan 306 (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dapat menahan Terdakwa) tersebut, jika tidak hadir tanpa alasan yang sah, ada kekhawatiran akan melarikan diri, dan perkara tersebut sulit pembuktiannya, maka dapat di ajukan dengan acara pemeriksaan biasa<sup>46</sup>; dan

<sup>43</sup> Bahan ceramah Kabareskrim Polri pada Temu Wicara antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia, Jakarta, 14 Pebruari 2009, hal.8.

<sup>44</sup> Jawaban tertulis kepala Kejaksaan Negeri Bontang, loc.cit. hal. 7.

<sup>45</sup> Hasil wawancara (lisan) Penulis dengan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, op.cit.

<sup>46</sup> Bahan ceramah Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Pengawasan (Djoko Sarwoko) pada Temu Wicara antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia, Jakarta, 14 Pebruari 2009, hal.20.

- c. Terhadap tindak pidana Pemilu selebihnya, yaitu 48 (empat puluh delapan) pasal, karena diduga pembuktiannya mudah (sumir), maka perkaranya di ajukan dengan acara pemeriksaan singkat, jika Terdakwa tidak hadir, tidak dapat diputus verstek. Mengingat keterbatasan waktu yang ditentukan oleh UU No.10 Tahun 2008 hanya 7 (tujuh) hari, maka hakim harus berupaya dengan keras agar waktu tersebut tidak terlewati bila perlu hakim bersidang secara maraton.
5. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi<sup>47</sup>:
  - a. Putusan harus segera diketik, karena 3 (tiga) hari sejak di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, harus sudah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
  - b. Mengadakan sosialisasi kepada Hakim-hakim di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Timur agar mengingat waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu yang singkat dan tepat waktu.
  - c. Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu yang terlalu singkat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bah perbedaan penyelesaian tindak pidana pemilu dengan tindak pidana umum lainnya, antara lain: (1) Penyelesaian tindak pidana Pemilu lebih singkat dan harus dilaporkan kepada Bawaslu/Panwaslu, paling lambat 3 (tiga) hari sejak

perbuatan dilakukan; Sedangkan penyelesaian tindak pidana umum lainnya dilaporkan kepada Kepolisian, dan kewenangan menuntut pidana lebih lama. (2) Penyelesaian Tindak pidana pemilu tidak mengenal delik aduan atau *klacht delict*; sedangkan penyelesaian tindak pidana umum lainnya selain tindak pidana biasa (kriminal), juga di kenal adanya delik aduan (*klacht delict*). (3) Dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu Pemeriksaan dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat, dan Putusan hakim berupa putusan kumulatif (penjatuhan dua pidana pokok secara bersamaan), yaitu pidana penjara dan pidana denda; sedangkan penyelesaian tindak pidana umum lainnya Pemeriksaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) acara, yaitu : Acara pemeriksaan biasa; Acara pemeriksaan singkat; dan Acara pemeriksaan cepat, serta Putusan hakim hanya berupa putusan alternatif (menentukan hanya satu pidana pokok), kecuali ada penggabungan gugatan ganti rugi yang di ajukan oleh korban dalam persidangan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu, upaya hukum hanya sampai banding (Pengadilan Tinggi); sedangkan dalam penyelesaian tindak pidana umum lainnya, upaya hukum dapat berupa (1) Upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi); (2) Upaya hukum luar biasa (Kasasi demi kepentingan hukum, dan Peninjauan kembali).

Hambatan dalam penyelesaian suatu tindak pidana Pemilu DPRD di Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan adanya Penanganan/Penyelesaian suatu tindak pidana pemilu sangat singkat, maka banyak dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu tidak dapat diselesaikan dengan baik karena kesulitan mencari

<sup>47</sup> Wawancara (lisan) Penulis dengan Hakim/humas Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Op.cit.

alat-alat bukti. Selain itu, masyarakat yang mengetahui suatu tindak pidana pemilu, ada yang tidak bersedia menjadi saksi. Juga masih ada Pengadilan Negeri di Kalimantan Timur (misalnya Pengadilan Negeri Samarinda) yang memeriksa perkara tindak pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa (Pid.B), dengan alasan karena pengajuannya tergantung dari Jaksa Penuntut Umum setempat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi hambatan-hambatan penyelesaian suatu tindak pidana pemilu antara lain Perkara Tindak Pidana Pemilu yang di laporkan kepada Panwaslu, diproses atau ditangani dengan cepat oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Masyarakat  
Kepada masyarakat yang mengetahui suatu tindak pidana Pemilu, agar segera melapor kepada Panwaslu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya tindak pidana Pemilu, oleh karena apabila melewati waktu tersebut, maka tindak pidana pemilu tersebut tidak akan diproses dengan alasan lewat waktu (kadaluwarsa);
2. Panwaslu :
  - a. Seleksi Anggota Panwaslu seharusnya diutamakan calon yang mengerti hukum yang berhubungan dengan pemilu;
  - b. Panwaslu harus melakukan kerjasama dengan Pemantau, Saksi, Perguruan Tinggi, Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan KPU;
3. Penyidik Polri :
  - a. Penyidik Polri di harapkan keseriusannya untuk segera mencari alat-alat bukti tindak

pidana Pemilu yang belum dilengkapi oleh Panwaslu;

- b. Setelah Panwaslu di lantik, pihak Penyidik Polri segera memberi bimbingan teknik kepada Panwaslu mengenai cara menangani tindak pidana Pemilu.
4. Kejaksaan Negeri :  
Kejaksaan negeri dalam mengajukan tindak pidana Pemilu ke Pengadilan Negeri, agar di ajukan dengan "acara pemeriksaan singkat", karena pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana;
5. Pengadilan Negeri :  
Pengadilan Negeri dalam memberi pertimbangan hukum, harus memperlakukan semua Terdakwa sama (tidak membedakan perlakuan berdasarkan jabatan, pendidikan Terdakwa, dan lain-lain);
6. Pengadilan Tinggi :  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu mengingatkan kepada Pengadilan Negeri didalam wilayah hukumnya, agar pemeriksaan tindak pidana pemilu dalam persidangan dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat bukan acara pemeriksaan biasa.
7. Pemerintah
  - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD terutama pasal-pasal yang menyangkut penyelesaian tindak pidana pemilu perlu ditinjau kembali, karena waktu yang sangat singkat merupakan salah satu penghambat penyelesaian suatu tindak pidana pemilu.
  - b. Demikian pula unsur-unsur tindak pidana pemilu yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD masih ada beberapa klausul yang mengandung multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Prenada Media Group, 2010.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, CV. Rajawali Pers, 1987.
- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Harahap, M. Yahya, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan siding Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2009.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung, CV. Armico, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, 1986.
- ### Jurnal dan Makalah
- Djoko Sarwoko, *Beberapa catatan Pelanggaran Pidana Pemilu*, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Kabareskrim Polri, *Optimalisasi Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu melalui sentra Gakkumdu*, 2009.
- Ketua Muda Mahkamah Agung, *Bahan Ceramah pada Temu Wicara antara Mahkamah Konstitusi dengan KPU se-Indonesia*, Jakarta, 14 Pebruari 2009.
- Tajuddin, *Kendala Penyidik di dalam melakukan Penyidikan tindak Pidana Pemilu*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
- Wirdyaningsih, *Pengawasan Pemilu*, 2009.
- ### Putusan Pengadilan
- Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 04/Pid.S/2009/PN.Btg dalam perkara Terdakwa HARBIAH Binti SADIRAH;
- Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 08 / Pid.S / 2009 / PN. BTG, dalam perkara Terdakwa

Zulham, S.Sos Bin Paijan, tanggal 08 Mei 2009.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 92/PID/2009/PT.KT.SMDA dalam perkara Terdakwa Zulham, S. Sos Bin Paijan, tanggal 27 Mei 2009;

Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 09/Pid.S/2009/PN.Btg dalam perkara Terdakwa EVI ERNITA SIKUMBANG Binti BUSTARI CHANIAGO, tanggal 08 Mei 2009;

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 93/PID/2009/PT.KT.SMDA dalam perkara Terdakwa EVI ERNITA SIKUMBANG Binti BUSTARI CHANIAGO, tanggal 26 Mei 2009;

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 237/Pid.B/2009/PN.Smda, dalam perkara Para Terdakwa : 1. SUDARNO, SE Bin WIJI; 2. MAT TURI Bin ZAINUDDIN; 3. ZAENAL ABIDIN Als ZAENAL Bin ASMUNI, tanggal 3 Maret 2009.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 52/PID/2009/PT.KT.SMDA, dalam perkara Para Terdakwa : 1. SUDARNO, SE Bin WIJI; 2. MAT TURI Bin ZAINUDDIN; 3. ZAENAL ABIDIN Als ZAENAL Bin ASMUNI, tanggal 6 April 2009.

### **Undang-undang**

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia, *tentang Undang-undang Kekuasaan*

*Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintah Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, UU No. 12 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, UU Nomor 22 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59.

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU Nomor 10 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, UU Nomor 42 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176.

### **Peraturan-peraturan**

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 *Tentang Pedoman penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu Tahun 2009*.

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pedoman teknis pencalonan anggota DPR,*



*DPRD Provinsi, dan DPRD  
Kabupaten/Kota Tahun 2009.*  
Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008  
*Tentang Pedoman  
pelaksanaan kampanye  
pemilihan umum anggota DPR,  
DPD, dan DPRD.*